

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pada zaman dahulu Thailand Selatan merupakan salah satu negara yang memiliki kerajaan tersendiri, hingga kerajaan tersebut dijajah oleh kerajaan Siam atau Thailand. Setelah adanya perjanjian Anglo-Siam bagian dari wilayah Patani menjadi pemiliknya kerajaan Thailand. Masuknya tahun 1938 dibawah kepemimpinan Jenderal P.Phibulsongkhram yang menngadakan kebijakan asimilasi budaya Thai ke seluruh wilayah di Thailand. Kebijakan tersebut masyarakat minoritas pada bagian Thailand Selatan mengalami kesulitan dalam menjalani agama dan budaya mereka, tekanan dan penindasan tersebut mendorong masyarakat Melayu Patani berusaha untuk melepaskan diri dari Thailand.

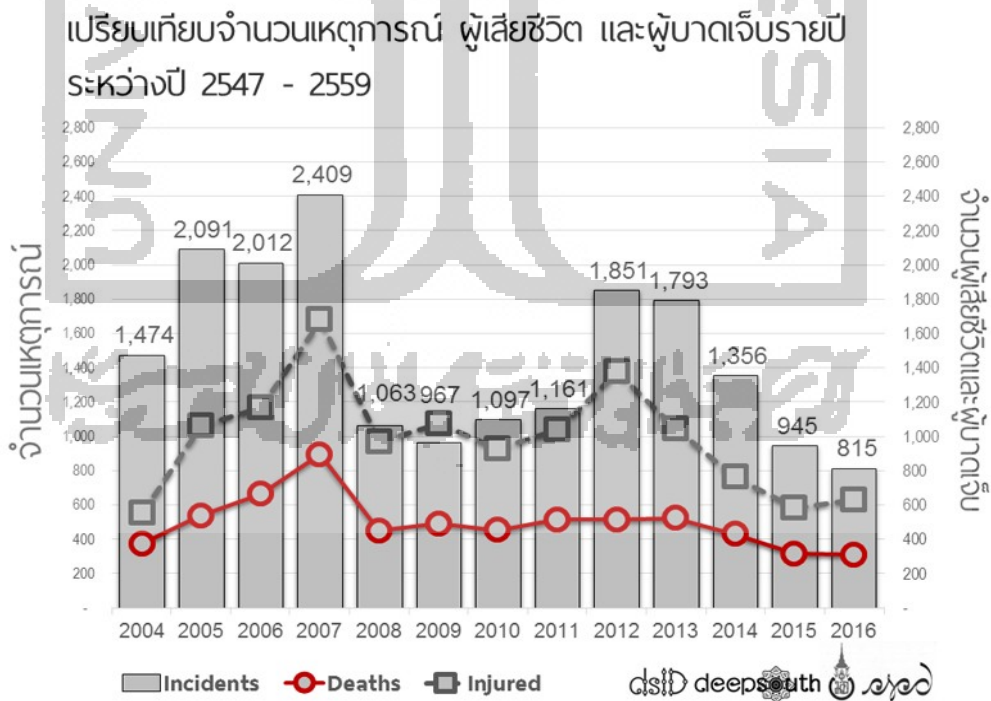
Akhirnya muncul gerakan untuk mempertahankan hak, budaya dan agama diawalkan oleh Haji Sulong yang mengajukan lima tuntutan kepada pemerintah Thailand. Akan tetapi, permintaan tersebut gagal, akhirnya Haji Sulong ditangkap dengan tunduhan sebagai penghasutan dan dihilangkan tanpa jejak. Oleh karena itu, kebijakan integrasi pemerintah Thailand mendapat tantangan keras dari masyarakat dan menimbulkan perlawanan separatisme.

Setelah kematian Haji Sulong, munculnya berbagai gerakan separatisme diawalkan oleh Gabungan Melayu Patani Raya (GEMPAR) dengan tujuan menyatukan kaum Melayu untuk menuntut kemerdekaan dari pemerintah Thailand dan muncul *National Liberation Front* (NLF), bertujuan untuk menuntut otonomi dan mendirikan negara Islam. Tidak sekedar itu gerakan separatisme semakin

berkembang dan memiliki banyak kelompok seperti BRN, PULO, Bersatu. Akan tetapi gerakan pada masa ini tidak terlalu mendapatkan dukungan oleh masyarakat.

Masuknya tahun 2000an aksi kekerasan mengalami peningkatan hingga terjadinya tiga insiden besar pada tahun 2004 yang menewaskan masrakat dijumlah yang sangat tinggi. Setelah insiden tersebut pemerintah tidak lagi memiliki sengketa dengan kelompok separatisme, tetapi masyarakat yang mengalami insiden yang dilakukan oleh pemerintah membuat konflik di Thailand Selatan semakin kental dan sulit diatasinya. Setelah insiden besar pemerintah mengeluarkan dua kebijakan yang semakin menambah permasalahan seperti menurunkan tentara dan membentuk hukum khusus yang melanggar hak asasi manusia masyarakat.

Tabel: Perbandingan jumlah peristiwa kekerasan, jumlah kematian dan jumlah peluka tahun 2004-2016



Sumber: [CITATION Dee17 \l 1033]

Namun, ada beberapa negara yang mengikuti konflik di Thailand Selatan sekaligus menyarankan arah penyelesaian kepada pemerintah seperti OKI dan Malaysia. Meskipun telah ada bantuan dari beberapa pihak internasional konflik di Thailand Selatan masih belum selesai hingga sekarang.

Terdapat empat atribut penyelesaian dari konsep *collective identity* yaitu *constitutive norms* adalah langkah yang penting bagi pemerintah dalam menyelesaikan masalah seperti saling memahami dan menghormati, *social purposes* adalah menemukan titik keinginan yang sama oleh pemerintah dan masyarakat untuk mencapai kepada tujuannya, *relational comparisons with other social categories*, adalah tugas dari pemerintah dalam menemukan cara penyelesaian konflik yang relevan dengan mengikuti atau mempelajari kasus negara lain sebagai model, *cognitive model* adalah tugas pemerintah dalam membentuk kerangka pemikiran masyarakat termasuk masyarakat wilayah Selatan dan masyarakat wilayah lain untuk membangun pemahaman yang sama dan sekaligus mengeluarkan kebijakan yang menunjuk kepada kesamaan. Dan pentingnya bagi pemerintah dalam memahami konflik dengan memandang situasi konflik hingga mengeluarkan penyelesaian yang sesuai dengan kondisi konflik, termasuk cara yang diterima oleh semua pihak tak terkecuali.

4.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan maka rekomendasi ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait, yaitu, (1) pemerintah Thailand (2) masyarakat dan pemuda Thailand (3) penelitian selanjutnya.

1. Peneliti berharap kepada pemerintahan Thailand untuk segera menyelesaikan Konflik di Thailand Selatan secara efektif, dengan cara penyelesaian yang mengikuti syarat hak asasi manusia, menghindari kekerasan dan mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan Rakyat.

2. Peneliti berharap kepada masyarakat Patani, terutama pemuda atau mahasiswa dalam melanjutkan karya-karya yang berkaitan dengan konflik di Thailand Selatan yang lebih bagus dan menyampaikan akar-akar permasalahan untuk menemukan cara penyelesaian yang lebih sesuai dengan keinginan masyarakat.

3. Rekomendasi penelitian selanjutnya, didasarkan keterbatasan penelitian. Keterbatasan penelitian ini meliputi, (1) pemilihan nara sumber, (2) keterbatasan wawancara dalam mendalami konflik, (3) metode penelitian, sehingga direkomendasikan pada penelitian selanjutnya:

a. Pada penelitian ini pemilihan nara sumber hanya di tingkat mikro, sehingga pada penelitian selanjutnya direkomendasikan (1) memperluas nara sumber lebih banyak. (2) menemukan nara sumber yang memberitahukan tentang konflik lebih dalam. (3) penelitian ini menggunakan metode kualitatif, maka peneliti direkomendasikan kepada penelitian selanjutnya untuk melakukan penelitian lebih variasi.